

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat mengalami perubahan, yang mana sebelum reformasi, sistem pemerintahan yang dianut bersifat sentralistik, kemudian semenjak tahun 1999 berubah menjadi sistem desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah yang ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dilakukan revisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas dalam menggunakan sumber-sumber perekonomian daerah yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi salah satu sumber pendanaan bagi belanja daerah yang digunakan dalam kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah tersebut disini lebih diarahkan pada Belanja Modal.

Menurut Mardiasmo (2002:67), belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Belanja modal

menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pengalokasian belanja modal oleh pemerintah daerah tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah atas aset tetap yang berupa sarana dan prasarana agar dioptimalkan secara baik dalam menjalani pelaksanaan tugas pemerintahan daerah serta untuk pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Halim (2001:100), untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus-menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri.

Kemampuan keuangan dan kemandirian daerah antara satu dengan lainnya berbeda sehingga dapat mengakibatkan timbulnya ketimpangan fiskal. Dalam mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah memberikan Dana Perimbangan. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004).

DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri neto berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengalokasian DAU sendiri berdasarkan yang mana selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah serta alokasi dasar dihitung

berdasarkan jumlah gaji PNS daerah. Daerah yang memiliki potensi fiskal yang relatif besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh DAU relatif kecil. Sebaliknya bagi daerah yang mempunyai potensi fiskal relatif kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh DAU relatif besar.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Halim (2016:139), adalah dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK hanya dapat digunakan untuk kegiatan tertentu seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan dan jembatan, kehutanan, pertanian, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, perikanan, dan kelautan.

Selain dari PAD dan dana transfer dari pusat untuk membiayai kegiatan suatu daerah (DAU dan DAK), pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA menurut Mahmudi (2015:76), adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran. SiLPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi sebuah pengeluaran pada pemerintah daerah, karena SiLPA hanya akan terbentuk apabila terjadi surplus pada APBD serta sekaligus terjadi pembiayaan neto dengan arah yang positif, yang mana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan yang ada (Balai Litbang NTT dalam Nurachman, 2015).

Menurut Penelitian Mufida dan Suryono (2016) PAD dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sementara menurut penelitian Prastiwi, Nurlaela, dan Yuli (2016) menyatakan bahwa variabel PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Menurut penelitian Imas dan Sugeng (2015) PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan dan DAK SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sementara Penelitian Sugiathi dan Supadmi (2014) PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini diajukan karena adanya *research gap* pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan variabel-variabel independen yang memiliki perbedaan hasil antara penelitian yang satu dengan yang lain.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Binti Amaliyah Mufida dan Bambang Suryono (2016) dengan menggunakan variabel dependen Belanja Modal dan variabel independennya PAD, DAU, DAK, dan SiLPA. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, penulis ingin mengembangkan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:

1. Jika pada penelitian sebelumnya tahun penelitian 2010-2014, maka pada penelitian ini penulis menggunakan tahun penelitian 2013-2015.

2. Jika pada penelitian sebelumnya objek penelitian di Kabupaten/Kota di Jawa Timur sedangkan penelitian ini penulis melakukan objek penelitian di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah, serta menambah satu variabel independen yaitu SiLPA.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi fokus penelitian ini adalah “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASIUMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAPBELANJA MODAL PADA TAHUN 2013-2015” (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Dengan faktor-faktor yang diteliti pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan Pemerintah Daerah dalam upaya pengambilan kebijakan publik, peningkatan pelayanan terhadap publik secara merata serta dapat mengoptimalkan berbagai sumberpotensi-potensi yang ada secara efektif, efisien, dan ekonomis serta dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal?
2. Apakah DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal?
3. Apakah DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal?
4. Apakah SiLPABerpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal?

### C. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.
2. Menganalisis pengaruh DAU terhadap Belanja Modal.
3. Menganalisis pengaruh DAK terhadap Belanja Modal.
4. Menganalisis pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal.

### D. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. **Manfaat Teoritis**

Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang sekaligus dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan topik bahasan yang sejenis di masa yang akan datang.

#### 2. **Manfaat Praktis**

##### a. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuandaerah.

##### b. Bagi pengembangan ilmu

penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SiLPA terhadap Belanja Modal.

## **E. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab. Adapun garis besar isi dan kronologi penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori yang berisi tentang pengertian Belanja Modal, PAD, DAU, DAK, SiLPA, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, instrumen penelitian, serta pembahasan hasil analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data, analisis data, serta pembahasan hasil analisis data.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan.